

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan, yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi, yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan prosedur akuntansi untuk lingkungan pemerintah daerahnya yang pedomannya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang menjadi kriteria pertama untuk pemberian opini oleh pemeriksa adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan maka disusunlah Prosedur akuntansi untuk laporan pertanggungjawaban pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Selanjutnya, pada kerangka konseptual SAP dijelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) prinsip akuntansi yang harus dipahami dan ditaati dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip Substansi mengungguli bentuk formal;
5. Prinsip Periodisitas;
6. Prinsip Konsistensi;
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap;
8. Prinsip Penyajian Wajar.

Berdasarkan prinsip pertama yaitu basis akuntansi dinyatakan bahwa Pemerintah menyusun laporan keuangan menerapkan SAP berbasis AkruaI. Penerapan SAP berbasis AkruaI dilaksanakan bertahap dari SAP berbasis Kas Menuju AkruaI

menjadi SAP berbasis AkruaI. Atas hal tersebut maka SAP berbasis kas menuju akruaI berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis AkruaI. Waktu yang diberikan untuk masa transisi sesuai dengan peraturan tersebut yaitu paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun 2010 atau Basis Kas Menuju AkruaI dapat digunakan paling lama sampai dengan Tahun 2014, yang mana untuk penyusunan laporan keuangan Tahun 2015 seluruh pemerintah diwajibkan untuk menggunakan SAP basis AkruaI.

Atas hal tersebut, untuk Laporan Keuangan tahun 2013 Pemerintah masih dapat menggunakan basis Kas Menuju AkruaI, maka penulis akan menjabarkan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Kas Menuju AkruaI sesuai yang dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Sebagai salah satu kabupaten yang sudah lama di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo masih menghadapi berbagai masalah terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dapat diindikasikan dengan belum adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI kepada Kabupaten Boalemo selama 6 (enam) tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Boalemo

TA Laporan Keuangan	Opini BPK RI	Permasalahan/Pengecualian
1	2	3
2007	Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	Saldo Kas di Kas Daerah
2008	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	Aset Tetap, Dana Bergulir, dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Lanjutan tabel di atas:

1	2	3
2009	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	Aset Tetap
2010	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	Aset Tetap
2011	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	Aset Tetap dan Persediaan
2012	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	Aset Tetap

Sumber: Arsip Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada 6 (enam) tahun terakhir, Kabupaten Boalemo belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dikarenakan masih terdapat permasalahan pada penyajian akun-akun di Laporan Keuangan. Penjelasan atas permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan TA 2007

Pada LHP tersebut BPK menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2007 diberikan opini “tidak memberikan pendapat (*disclaimer*)” karena pihak pemerintah daerah tidak dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung atas akun kas tunai sebesar Rp3.266.611.836,39. (sumber dari LHP BPK RI Tahun 2008)

2. Laporan Keuangan TA 2008

Pada LHP tersebut BPK menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2008 diberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)” karena nilai aset tetap belum didukung

rincian yang memadai, belum disajikannya nilai dana bergulir pada neraca, dan terdapat kesalahan penyajian pada LRA TA 2008. (Sumber LHP BPK RI Tahun 2009)

3. Laporan Keuangan TA 2009

Pada LHP tersebut BPK menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2009 diberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)” karena penatausahaan aset pemerintah daerah belum tertib sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya. (Sumber LHP BPK RI Tahun 2010)

4. Laporan Keuangan TA 2010

Pada LHP tersebut BPK menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2010 diberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)” karena catatan dan data tentang aset tetap tidak memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya. (Sumber LHP BPK RI Tahun 2011)

5. Laporan Keuangan TA 2011

Pada LHP tersebut BPK menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2011 diberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)” karena pencatatan atas mutasi persediaan tidak memadai dan terdapat perbedaan nilai antara aset tetap di bidang aset BPKAD dengan SKPD yang tidak dapat dijelaskan. (Sumber LHP BPK RI Tahun 2012)

6. Laporan Keuangan TA 2012

Pada LHP tersebut BPK menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2012 diberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)” karena penatausahaan dan pencatatan aset tetap tidak memadai sehingga penyajiannya tidak dapat diyakini kewajarannya. (Sumber LHP BPK RI Tahun 2013)

Analisis atas laporan keuangan pemerintah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu, Rosadi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis terhadap proses penyusunan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan pada format laporan keuangan, penyajian CaLK, dan rincian/lampiran pendukung laporan keuangan. Selain itu Naru (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Penyajian Pos-Pos Neraca Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2008. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa saldo dan pengungkapan pada akun neraca yang belum sesuai dengan SAP.

Penelitian Fitri (2011) yang berjudul Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi eksploratif pada kabupaten/kota di Sumatera Barat). Hasil penelitian tersebut yaitu masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2011) yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aset tetap

pada Neraca tidak disajikan secara rinci dan memadai, namun untuk LRA, LAK, dan CaLK telah disajikan sesuai dengan SAP.

Berdasarkan kriteria penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara wajar menurut SAP, fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Boalemo, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis laporan keuangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan diajukan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 *Unaudited***” untuk membahas dan menganalisis isi dari Laporan Keuangan tersebut, serta sejauh mana penyusunan laporan keuangan tersebut sesuai dengan kriteria dan prinsip pelaporan yang baik sehingga memberikan jaminan yang memadai untuk mencapai keandalan pelaporan, transparansi, akuntabilitas, ketaatan terhadap peraturan, serta efektivitas dan efisiensi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Nilai yang disajikan pada setiap akun belum didukung dengan kelengkapan dokumen yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo telah disajikan secara andal, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien dengan memperhatikan:

1. Apakah penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo telah sesuai dengan prinsip-prinsip laporan keuangan pada Standar Akuntansi Pemerintah?
2. Apakah nilai pada akun-akun laporan keuangan telah disajikan secara wajar dengan didukung oleh dokumen yang memadai?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2013 telah sesuai dengan prinsip-prinsip laporan keuangan pada Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Nilai pada akun-akun laporan keuangan telah disajikan secara wajar dengan didukung oleh dokumen yang memadai.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Akuntansi Sektor Publik khususnya Akuntansi Pemerintahan kaitannya dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu diharapkan pula menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo yaitu sebagai masukan untuk melakukan koreksi pada setiap akun yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kebijakan Akuntansi, dan ketentuan lainnya guna meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk saat ini dan masa yang akan datang.